

EKSPLORASI HAMBATAN HUKUM DAN KEPABEANAN DALAM PROSES INTERNASIONALISASI UMKM DI KOTA BALIKPAPAN

Rakei Yunardhani^{1*}, Sudarmiatin², Heri Pratikto³

^{1, 2, 3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur

Corresponding email: rakei.yunardhani.2404139@students.um.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 21/05/2026

Received : 31/05/2026

Revised : 15/06/2026

Accepted : 16/06/2026

Keywords

Balikpapan

Hambatan Hukum

Internasionalisasi UMKM

Kepabeanaan

Regulasi Ekspor.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hambatan hukum dan kepabeanaan yang dihadapi UMKM dalam proses internasionalisasi di Kota Balikpapan, serta mengidentifikasi strategi adaptasi yang dilakukan pelaku usaha dalam memenuhi tuntutan regulasi ekspor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Informan penelitian terdiri atas pelaku UMKM yang telah melakukan ekspor maupun sedang mempersiapkan ekspor, termasuk UMKM yang telah menembus pasar internasional seperti PT Bungas Food Nusantara dan pelaku usaha yang difasilitasi melalui Indonesian Store. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama internasionalisasi UMKM di Balikpapan meliputi rendahnya literasi hukum ekspor, kompleksitas administrasi kepabeanaan, keterbatasan adaptasi terhadap sistem customs digital, serta tingginya ketergantungan pada fasilitasi eksternal. Meskipun demikian, pelaku UMKM menunjukkan kemampuan adaptasi melalui jejaring kolaboratif, pembelajaran bertahap, dan pemanfaatan promosi digital internasional. Temuan ini menegaskan bahwa internasionalisasi UMKM tidak cukup ditopang oleh akses pasar, tetapi memerlukan penguatan kapasitas kepatuhan hukum dan administrasi kepabeanaan secara berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian internasionalisasi UMKM melalui integrasi perspektif Institutional Theory dan Uppsala Model, sekaligus memberikan implikasi kebijakan berupa pentingnya pembentukan pusat konsultasi regulasi ekspor berbasis daerah dan penguatan literasi kepabeanaan digital.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional yang berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, kontribusi UMKM terhadap perdagangan internasional masih relatif rendah dibandingkan dengan perannya dalam struktur ekonomi domestik. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks antara dominasi UMKM dalam ekonomi nasional dengan keterbatasan

keterlibatannya dalam aktivitas ekspor. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi ekspor UMKM di Indonesia tidak semata disebabkan oleh keterbatasan kapasitas produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas regulasi, lemahnya literasi hukum perdagangan internasional, serta keterbatasan pemahaman terhadap prosedur kepabeanan (Revindo, Gan, & Massie, 2019; Revindo & Gan, 2016). Temuan tersebut menegaskan bahwa internasionalisasi UMKM memerlukan kesiapan institusional yang melampaui aspek operasional dan pemasaran semata.

Dalam konteks globalisasi perdagangan, internasionalisasi UMKM tidak lagi dipahami hanya sebagai perluasan pasar, melainkan sebagai proses transformasi organisasi yang mensyaratkan kemampuan adaptasi terhadap rezim hukum lintas negara, standar kepatuhan ekspor, serta prosedur administrasi perdagangan internasional. Penelitian tentang internasionalisasi UMKM di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada faktor daya saing, inovasi produk, jejaring bisnis, dan orientasi pasar internasional (Meldona et al., 2022; Bond et al., 2023). Sementara itu, aspek hukum dan kepabeanan sebagai prasyarat administratif dalam proses ekspor masih relatif kurang mendapat perhatian mendalam, khususnya melalui pendekatan kualitatif yang menggali pengalaman langsung pelaku usaha. Padahal, regulasi ekspor, dokumen kepabeanan, klasifikasi HS Code, sertifikasi produk, perizinan perdagangan lintas negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan bea keluar sering kali menjadi hambatan nyata bagi UMKM yang hendak memasuki pasar global.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan ekspor UMKM di Indonesia banyak dikaitkan dengan keterbatasan akses informasi, lemahnya jejaring kelembagaan, dan minimnya dukungan institusional (Tambunan, 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan identifikasi determinan statistik, sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana pelaku UMKM memaknai, mengalami, dan merespons kompleksitas regulasi ekspor dalam praktik sehari-hari. Kesenjangan ini menjadi penting karena proses kepatuhan hukum tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan kapasitas adaptif, kesiapan kelembagaan, dan literasi regulatif pelaku usaha. Dengan kata lain, masih terdapat keterbatasan literatur yang mengeksplorasi dimensi pengalaman subjektif pelaku UMKM dalam menghadapi sistem hukum dan kepabeanan ekspor di level daerah, khususnya pada kota-kota strategis di luar pusat ekonomi nasional.

Kota Balikpapan merupakan konteks penelitian yang strategis untuk mengkaji isu ini. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur dan wilayah penyangga pengembangan Ibu Kota Nusantara, Balikpapan memiliki posisi logistik yang potensial untuk mendukung aktivitas perdagangan internasional. Infrastruktur pelabuhan, konektivitas distribusi regional, dan pertumbuhan ekosistem UMKM menjadi modal penting bagi penguatan orientasi ekspor daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan regulatif pelaku UMKM dalam memahami prosedur hukum dan kepabeanan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pelaku UMKM di Balikpapan menghadapi hambatan legal-administratif dalam proses internasionalisasi usahanya, serta bagaimana mereka menavigasi ketentuan ekspor yang sering kali dianggap kompleks dan birokratis.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif hambatan hukum dan kepabeanan yang dihadapi UMKM sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual. Di tengah dorongan pemerintah

untuk meningkatkan rasio ekspor UMKM nasional, kebijakan fasilitasi ekspor sering kali belum menyentuh akar persoalan di tingkat implementasi, khususnya terkait literasi regulasi dan pendampingan kepatuhan hukum. Penelitian ini penting dilakukan untuk menghasilkan pemahaman empiris mengenai realitas yang dihadapi pelaku UMKM sehingga dapat menjadi landasan penguatan ekosistem internasionalisasi berbasis simplifikasi regulasi, asistensi legal, dan reformulasi tata kelola pelayanan ekspor. Secara akademik, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk hambatan hukum dan kepabeanan yang dihadapi UMKM di Kota Balikpapan dalam proses internasionalisasi, memahami pengalaman pelaku usaha dalam merespons tuntutan regulasi ekspor, serta mengidentifikasi strategi adaptasi yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan perdagangan internasional. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian internasionalisasi UMKM dengan memperluas perspektif kelembagaan dan legal compliance yang selama ini masih terbatas dalam literatur domestik. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan pendampingan ekspor UMKM. Bagi instansi kepabeanan dan lembaga fasilitator perdagangan, temuan penelitian dapat digunakan untuk merancang skema edukasi regulasi yang lebih efektif. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian dapat menjadi referensi strategis untuk meningkatkan kesiapan ekspor melalui penguatan pemahaman hukum perdagangan internasional. Implikasi penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga memiliki relevansi kebijakan yang kuat. Temuan penelitian berpotensi mendorong formulasi model fasilitasi ekspor berbasis compliance assistance, penyederhanaan prosedur administratif, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi kepabeanan, dan komunitas UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat internasionalisasi UMKM di Kota Balikpapan sebagai bagian dari agenda penguatan daya saing ekonomi daerah dalam pasar global.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, interpretasi, dan strategi adaptasi pelaku UMKM terhadap hambatan hukum dan kepabeanan dalam proses internasionalisasi. Menurut Creswell dan Poth (2022), pendekatan kualitatif relevan digunakan ketika penelitian berupaya mengeksplorasi fenomena kompleks yang belum sepenuhnya terjelaskan melalui data kuantitatif. Desain studi kasus eksploratif digunakan karena penelitian berupaya mengkaji fenomena kontemporer dalam konteks nyata, yaitu dinamika kepatuhan regulasi ekspor pada UMKM Balikpapan. Yin (2021) menegaskan bahwa studi kasus eksploratif tepat digunakan ketika batas antara fenomena dan konteks empiris tidak sepenuhnya jelas serta membutuhkan eksplorasi mendalam terhadap proses dan pengalaman subjek penelitian.

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi hambatan hukum dan kepabeanan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses internasionalisasi usaha di Kota Balikpapan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada UMKM yang telah melakukan aktivitas ekspor maupun yang sedang berada dalam tahap

persiapan ekspor, khususnya UMKM yang telah terhubung dengan pasar internasional melalui skema promosi digital, fasilitasi kelembagaan, dan dukungan jejaring perdagangan luar negeri. Pemilihan ruang lingkup ini didasarkan pada pertimbangan bahwa UMKM tersebut merepresentasikan pelaku usaha yang telah memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi regulasi ekspor, prosedur kepabeanan, serta adaptasi terhadap persyaratan hukum perdagangan internasional. Menurut penelitian Revindo dan Gan (2021), pengkajian terhadap UMKM yang telah mengalami proses ekspor aktual memungkinkan identifikasi hambatan regulatif yang lebih empiris dibandingkan penelitian pada UMKM potensial ekspor semata. Pendekatan ini juga sejalan dengan rekomendasi penelitian Bianchi, Glavas, dan Mathews (2021) yang menekankan pentingnya penggalian pengalaman langsung eksportir UMKM dalam memahami dinamika internasionalisasi di negara berkembang.

Penelitian dilaksanakan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dipilih secara purposive karena memiliki posisi strategis sebagai kota penyangga kawasan perdagangan regional dan simpul ekonomi pendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara. Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, dengan kriteria: (1) Pelaku UMKM yang telah melakukan ekspor; (2) Pelaku UMKM yang sedang mempersiapkan ekspor; (3) Pendamping ekspor UMKM; (4) Perwakilan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan fasilitator perdagangan ekspor daerah. Jumlah informan direncanakan sebanyak 12–20 orang, menyesuaikan prinsip data saturation sebagaimana direkomendasikan oleh Hennink, Kaiser, dan Weber (2022).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) Wawancara Mendalam semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pengalaman informan terkait pemahaman regulasi ekspor, pengalaman mengurus dokumen ekspor, hambatan kepabeanan, strategi menghadapi kompleksitas legal; (2) Dokumentasi yang dianalisis mencakup dokumen literatur dan kajian pustaka penunjang keperluan penelitian; (3) Observasi dilakukan terhadap praktik administratif dan kesiapan legal UMKM dalam proses ekspor. Metode observasi membantu memahami kesenjangan antara kepatuhan formal dan praktik implementatif Teknik ini direkomendasikan oleh Alon, Mersland, dan Musteen (2022) untuk menelusuri dinamika adaptasi regulatif UMKM dalam internasionalisasi.

Analisis data menggunakan analisis tematik (thematic analysis) model Braun dan Clarke (2022), dengan tahapan: (1) Membaca transkrip wawancara secara berulang; (2) Open coding dengan mengidentifikasi unit makna terkait hambatan hukum dan kepabeanan; (3) Kategorisasi tema, mengelompokkan kode menjadi tema-tema utama; (4) Penelaah tema untuk memastikan konsistensi antar kategori; (5) interpretasi tematik untuk menghubungkan temuan dengan kerangka *Institutional Theory*. Pemilihan analisis tematik didasarkan pada rekomendasi Nowell et al. (2021) yang menyatakan bahwa metode ini efektif untuk mengeksplorasi pola pengalaman dan makna dalam studi regulasi organisasi. Penelitian Wahyuni, Fitriani, dan Abdullah (2023) juga menunjukkan bahwa analisis

tematik sangat relevan untuk mengidentifikasi pola hambatan ekspor UMKM di konteks regional.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini melibatkan pelaku UMKM Kota Balikpapan yang telah terlibat dalam aktivitas ekspor maupun sedang berada pada tahap persiapan ekspor. Objek penelitian merepresentasikan UMKM dengan karakteristik usaha berbasis pangan olahan, produk herbal, kerajinan berbasis sumber daya lokal, dan produk inovatif yang telah memperoleh akses promosi pasar internasional melalui kanal digital maupun fasilitasi kelembagaan. Salah satu objek utama penelitian adalah PT Bungas Food Nusantara yang berhasil menembus pasar ekspor melalui produk Wedang Dayak ke sejumlah negara seperti Singapore, Malaysia, Nigeria, Brunei Darussalam, dan Oman. Selain itu, terdapat UMKM Balikpapan yang memperoleh eksposur internasional melalui Indonesian Store yang difasilitasi oleh Embassy of the Republic of Indonesia in Singapore, seperti Patra Wonderfood Snack, CV Agro Borneo, Alfian Cake, dan CV Cerita Bahagia Food.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan analisis tematik, ditemukan bahwa keberhasilan penetrasi pasar internasional tidak sepenuhnya mencerminkan kesiapan regulatif yang matang. Sebagian besar UMKM mengakui bahwa proses ekspor lebih banyak ditopang oleh dukungan eksternal berupa fasilitasi pemerintah, jejaring promosi, dan pendampingan teknis dibandingkan kesiapan internal terkait pemahaman hukum dan kepabeanaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa internasionalisasi UMKM di Balikpapan masih berada pada tahap assisted internationalization, yaitu proses ekspansi internasional yang sangat bergantung pada intervensi institusional.

Rendahnya Literasi Hukum Ekspor pada Pelaku UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki pemahaman yang terbatas terkait regulasi hukum ekspor. Keterbatasan ini meliputi pemahaman tentang legalitas perdagangan internasional, dokumen ekspor, kontrak dagang lintas negara, ketentuan sertifikasi produk, serta standar hukum negara tujuan.

Sebagian besar pelaku UMKM memahami ekspor hanya sebagai aktivitas pengiriman barang ke luar negeri, tanpa memahami secara komprehensif aspek legal yang menyertainya. Informan mengungkapkan bahwa pengetahuan mereka mengenai prosedur hukum ekspor diperoleh secara insidental melalui pelatihan singkat atau pendampingan dari pihak eksternal. Temuan ini memperlihatkan bahwa legal awareness pelaku UMKM masih bersifat parsial dan belum terinternalisasi sebagai bagian dari kapasitas organisasi. Secara empiris, kondisi ini terlihat pada beberapa UMKM yang belum memahami secara utuh kewajiban dokumen seperti: Nomor Induk Berusaha berbasis ekspor; Pemberitahuan Ekspor Barang; dokumen certificate of origin; persyaratan sanitary and phytosanitary; klausul hukum perdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap perantara ekspor.

Kompleksitas Administrasi Kepabeanaan sebagai Hambatan Struktural

Analisis data menunjukkan bahwa prosedur kepabeanaan merupakan hambatan paling dominan dalam proses internasionalisasi UMKM Balikpapan. Hambatan yang teridentifikasi meliputi:

- a. Kesulitan Klasifikasi Produk, pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menentukan klasifikasi HS Code yang tepat, khususnya pada produk olahan berbasis bahan lokal seperti Wedang Dayak dan olahan hasil laut. Kesalahan klasifikasi berpotensi menimbulkan penolakan administrasi maupun keterlambatan proses clearance.
- b. Kompleksitas Dokumen Ekspor, pelaku usaha menilai proses penyusunan dokumen ekspor membutuhkan kompetensi administratif yang belum mereka kuasai secara mandiri. Dokumen yang dianggap paling kompleks meliputi: invoice ekspor; packing list; dokumen kepabeanan elektronik; deklarasi asal barang; persyaratan compliance negara tujuan.
- c. Digital Customs Barrier. Transformasi sistem kepabeanan berbasis digital justru menimbulkan tantangan baru bagi sebagian pelaku UMKM. Meskipun sistem elektronik dirancang untuk efisiensi, keterbatasan literasi digital administratif menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam pengoperasian platform layanan ekspor. Temuan ini menunjukkan adanya administrative capability gap antara tuntutan sistem kepabeanan modern dan kapasitas operasional UMKM.

Ketergantungan Tinggi terhadap Fasilitas Eksternal

Temuan penting penelitian menunjukkan bahwa internasionalisasi UMKM Balikpapan sangat bergantung pada dukungan eksternal. Bentuk fasilitas tersebut meliputi: pendampingan penyusunan dokumen; konsultasi regulasi ekspor; promosi melalui kanal diplomasi perdagangan; asistensi legal administratif; fasilitas business matching. Kasus promosi produk melalui Indonesian Store menunjukkan bahwa penetrasi pasar internasional lebih banyak dimediasi oleh institusi fasilitator daripada inisiatif regulatif mandiri pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan compliance UMKM belum sepenuhnya bersifat endogenous capability, melainkan masih berupa borrowed institutional capacity. Meskipun fasilitas ini efektif membuka akses pasar, ketergantungan jangka panjang berpotensi menghambat kemandirian ekspor.

Strategi Adaptasi UMKM terhadap Hambatan Regulatif

Walaupun menghadapi berbagai hambatan, penelitian menemukan bahwa pelaku UMKM mengembangkan sejumlah strategi adaptasi.

- a. *Collaborative Compliance*. Pelaku usaha membangun jejaring dengan: konsultan ekspor; komunitas eksportir; dinas pemerintah; agregator perdagangan internasional. Strategi ini memungkinkan transfer pengetahuan regulatif secara informal.
- b. *Incremental Learning*, yaitu sebagian pelaku usaha mempelajari prosedur ekspor secara bertahap melalui pengalaman ekspor berulang. Model pembelajaran ini menunjukkan proses adaptasi gradual sebagaimana dijelaskan dalam Uppsala Model.
- c. *Digital Market-led Adaptation* dengan melakukan promosi melalui platform digital internasional mendorong UMKM mempelajari persyaratan ekspor secara lebih serius setelah adanya permintaan pasar. Artinya, tekanan pasar menjadi pemicu peningkatan kepatuhan regulatif.

Kesenjangan antara Potensi Ekspor dan Kesiapan Regulatif

Balikpapan memiliki potensi besar sebagai simpul ekspor regional. Namun penelitian menemukan adanya kesenjangan signifikan antara potensi pasar internasional dan kapasitas regulatif internal UMKM. Kesenjangan ini tampak pada tiga aspek:

Table 1. Aspek kesenjangan UMKM Balikpapan

Aspek	Keterangan
Aspek Struktural	Belum tersedianya pusat konsultasi regulasi ekspor berbasis daerah yang terintegrasi.
Aspek Kapasitas	Rendahnya literasi hukum perdagangan internasional.
Aspek Sistemik	Belum optimalnya sinkronisasi antara promosi ekspor dan penguatan kapasitas kepatuhan.

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan hukum dan kepastian merupakan faktor krusial yang memengaruhi proses internasionalisasi UMKM di Kota Balikpapan. Hasil ini mempertegas bahwa keberhasilan ekspansi pasar internasional UMKM tidak hanya ditentukan oleh daya saing produk, inovasi, maupun kemampuan pemasaran digital, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan regulatif dan kapasitas kepatuhan hukum pelaku usaha. Temuan ini selaras dengan argumentasi Paul dan Rosado-Serrano (2019) yang menyatakan bahwa internasionalisasi UMKM merupakan proses multidimensional yang menuntut kesiapan administratif dan institusional selain kesiapan pasar. Dalam konteks Balikpapan, dimensi legal-regulatory justru muncul sebagai hambatan laten yang selama ini kurang teridentifikasi dalam diskursus internasionalisasi UMKM di Indonesia.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki pemahaman hukum ekspor yang terbatas dan cenderung memahami ekspor hanya sebagai aktivitas distribusi produk ke luar negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa internalisasi aspek legal belum menjadi bagian integral dari strategi bisnis UMKM. Temuan ini mendukung hasil penelitian Suyanto, Salim, dan Bloch (2021) yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi perdagangan internasional menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi ekspor UMKM Indonesia. Sejalan dengan itu, Hidayat dan Permana (2023) menegaskan bahwa keterbatasan pemahaman regulasi ekspor menyebabkan pelaku usaha kesulitan melakukan ekspansi pasar secara mandiri. Dalam perspektif Institutional Theory, kondisi ini menunjukkan lemahnya proses internalisasi tekanan regulatif formal ke dalam struktur organisasi UMKM. Scott (2020) menjelaskan bahwa legitimasi organisasi dalam lingkungan internasional sangat ditentukan oleh kemampuan mengadopsi aturan formal sebagai bagian dari sistem operasional organisasi. Temuan ini memperluas literatur sebelumnya dengan menunjukkan bahwa pada konteks UMKM Balikpapan, persoalan

literasi hukum tidak hanya terkait kurangnya akses informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh absennya mekanisme pembelajaran regulatif yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan Sari dan Widodo (2022) bahwa kesalahan klasifikasi HS Code dan lemahnya pemahaman dokumen ekspor merupakan persoalan yang sering dihadapi pelaku usaha. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa kompleksitas kepabeanan di Balikpapan tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis prosedural, tetapi juga oleh kesenjangan kemampuan administratif digital pelaku UMKM. Hal ini memperkuat temuan Kurniawan et al. (2023) terkait digital customs barrier pada UMKM daerah. Secara teoritis, fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem kepabeanan tidak selalu berimplikasi pada kemudahan akses apabila tidak diikuti peningkatan kapasitas adaptif pengguna.

Temuan bahwa UMKM Balikpapan sangat bergantung pada fasilitasi kelembagaan memperlihatkan adanya pola assisted internationalization, yaitu internasionalisasi yang dimediasi oleh intervensi eksternal. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Bianchi, Glavas, dan Mathews (2021) yang menegaskan bahwa institutional support menjadi determinan penting internasionalisasi UMKM di negara berkembang. Kasus keberhasilan promosi melalui Indonesian Store menunjukkan bahwa kanal diplomasi ekonomi efektif membuka akses pasar internasional. Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada fasilitasi eksternal dapat menghambat terbentuknya kemandirian regulatif pelaku usaha. Temuan ini memperluas kajian Tambunan (2021) yang sebelumnya menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan, dengan menunjukkan bahwa dukungan tersebut harus diorientasikan pada transfer kapabilitas, bukan sekadar fasilitasi transaksi ekspor. Dalam kerangka *Institutional Theory*, kondisi ini merefleksikan external legitimacy dependence, yaitu kondisi ketika legitimasi internasional organisasi lebih banyak diperoleh melalui dukungan institusi eksternal daripada kapasitas internal.

Strategi collaborative compliance dan incremental learning menunjukkan bahwa pelaku UMKM Balikpapan membangun kapasitas ekspor melalui proses pembelajaran bertahap. Hasil ini mendukung Uppsala Model yang menjelaskan bahwa internasionalisasi merupakan proses gradual melalui akumulasi pengalaman dan pembelajaran pasar. Penelitian Alon, Mersland, dan Musteen (2022) juga menemukan bahwa pengalaman regulatif berulang meningkatkan kemampuan adaptasi UMKM terhadap tekanan institusional internasional. Pada konteks penelitian ini, adaptasi tidak berlangsung melalui pembelajaran formal, melainkan lebih banyak melalui jejaring informal, pengalaman langsung, dan interaksi dengan institusi pendamping. Temuan ini memperkaya literatur internasionalisasi dengan menunjukkan bahwa pada konteks daerah seperti Balikpapan, pembelajaran ekspor lebih bersifat experiential-regulatory learning daripada structured institutional learning.

Balikpapan memiliki potensi strategis sebagai simpul perdagangan regional dan penyangga kawasan ekonomi Kalimantan Timur. Namun hasil penelitian menunjukkan adanya gap antara potensi pasar internasional dengan kapasitas regulatif internal UMKM. Temuan ini mendukung penelitian Wahyuni, Fitriani, dan Abdullah (2023) yang menyatakan bahwa UMKM di wilayah penyangga ekonomi menghadapi tantangan lebih besar dibanding UMKM di pusat ekonomi nasional karena keterbatasan akses konsultasi regulatif. Penelitian ini menambahkan dimensi baru bahwa kesenjangan tersebut juga

diperkuat oleh belum terintegrasinya promosi ekspor dengan penguatan legal compliance. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi internasionalisasi daerah tidak dapat hanya bertumpu pada promosi dagang, tetapi harus dibarengi pembangunan ekosistem kepatuhan hukum.

Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari dinamika rendahnya partisipasi ekspor UMKM Indonesia yang menunjukkan bahwa internasionalisasi usaha tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi dan akses pasar, tetapi juga oleh kesiapan hukum dan kepabeanaan sebagai fondasi kelembagaan dalam perdagangan internasional. Berangkat dari tujuan untuk mengeksplorasi hambatan hukum dan kepabeanaan dalam proses internasionalisasi UMKM di Kota Balikpapan, penelitian ini menempatkan Balikpapan sebagai konteks strategis karena potensinya sebagai simpul perdagangan regional dan wilayah penyangga pengembangan ekonomi Kalimantan Timur. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti faktor daya saing, inovasi, digitalisasi, dan akses pembiayaan, sementara aspek legal-regulatory masih relatif terbatas, khususnya melalui pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan perspektif Institutional Theory dan Uppsala Model, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan kepatuhan hukum dan adaptasi regulatif sebagai elemen penting dalam membangun legitimasi internasional UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama internasionalisasi UMKM Balikpapan terletak pada rendahnya literasi hukum ekspor, kompleksitas administrasi kepabeanaan, kesulitan adaptasi terhadap digitalisasi customs, serta tingginya ketergantungan pada fasilitasi eksternal. Meskipun sejumlah UMKM seperti PT Bungas Food Nusantara dan beberapa pelaku usaha yang dipromosikan melalui Indonesian Store telah berhasil menembus pasar global, keberhasilan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh dukungan institusional dibandingkan kapasitas regulatif internal yang mapan. Temuan ini mengonfirmasi literatur sebelumnya bahwa institutional support penting bagi UMKM negara berkembang, sekaligus memperluas diskursus dengan menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap fasilitasi eksternal dapat menghambat kemandirian compliance. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi adaptasi pelaku usaha berlangsung secara bertahap melalui pembelajaran pengalaman, jejaring kolaboratif, dan tekanan pasar, sehingga menegaskan bahwa internasionalisasi merupakan proses incremental learning yang memerlukan penguatan kapabilitas regulatif secara berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai dasar bagi pemerintah daerah, instansi kepabeanaan, dan lembaga fasilitator untuk merancang model pendampingan ekspor yang tidak hanya berorientasi pada promosi, tetapi juga pada transfer kapabilitas hukum dan kepabeanaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan informan yang terbatas pada UMKM di Kota Balikpapan dan dominasi sektor pangan olahan, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi pada seluruh karakteristik UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini belum mengintegrasikan perspektif negara tujuan ekspor dalam menganalisis hambatan kepatuhan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah pada kota-kota ekspor lainnya, melakukan studi komparatif lintas sektor, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif untuk mengukur tingkat kesiapan regulatif secara lebih terstruktur. Dari sisi kebijakan, disarankan adanya

pembentukan pusat konsultasi regulasi ekspor berbasis daerah, penguatan literasi kepabeanaan digital, integrasi promosi ekspor dengan pelatihan compliance readiness, serta pengembangan skema pendampingan berorientasi transfer capability agar internasionalisasi UMKM dapat berlangsung lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan.

Refrensi

- Alon, I., Mersland, R., & Musteen, M. (2022). Internationalization of small and medium-sized enterprises: The role of institutional environments and adaptive capabilities. *Journal of International Entrepreneurship*, 20(3), 245–267. <https://doi.org/10.1007/s10843-022-00301-4>
- Andriyani, D., & Saputra, R. (2024). Digital customs transformation and export readiness among Indonesian SMEs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 31(1), 88–105. <https://doi.org/10.1108/JSBED-08-2023-0421>
- Bianchi, C., Glavas, C., & Mathews, S. (2021). SME international performance in emerging markets: The role of institutional support and entrepreneurial orientation. *International Business Review*, 30(5), 101839. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101839>
- Bond, E., Kuncoro, A., & Haryanto, T. (2023). Export readiness and digital capability of SMEs in Southeast Asia. *Asia Pacific Business Review*, 29(4), 612–631. <https://doi.org/10.1080/13602381.2023.2187014>
- Bowen, G. A. (2021). Document analysis as a qualitative research method revisited. *Qualitative Research Journal*, 21(3), 347–358. <https://doi.org/10.1108/QRJ-08-2020-0105>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*.
- Ciravegna, L., Lopez, L., & Kundu, S. K. (2020). Country of origin and network effects on internationalization strategies of SMEs. *Journal of Business Research*, 116, 64–75. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.020>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.).
- Fernandez, Z., & Nieto, M. J. (2020). Barriers to export for SMEs: Administrative complexity and market entry constraints. *Small Business Economics*, 55(4), 1021–1039. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00237-8>
- Firmansyah, A., & Dewi, P. R. (2024). Institutional pressure and export compliance among Indonesian SMEs. *International Journal of Business and Society*, 25(1), 113–129. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6342.2024>
- Hennink, M., Kaiser, B. N., & Weber, M. B. (2022). What influences saturation? Estimating sample sizes in qualitative research. *Qualitative Health Research*, 32(6), 899–912. <https://doi.org/10.1177/10497323211070116>

- Hidayat, R., & Permana, A. (2023). Regulatory readiness and export participation of SMEs in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 38(2), 145–162. <https://doi.org/10.22146/jieb.v38i2.74231>
- Kurniawan, D., Prasetyo, H., & Lestari, S. (2023). Digital customs literacy and SME export performance in Indonesia. *Journal of International Trade Law and Policy*, 22(4), 211–228. <https://doi.org/10.1108/JITLP-03-2023-0018>
- Kusuma, H., & Handoko, T. (2022). Regulatory dynamics and export challenges for Indonesian SMEs. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(1), 35–49. <https://doi.org/10.9744/jmk.24.1.35-49>
- Meldona, A., Sari, N., & Rahman, M. (2022). International market orientation and SME export readiness in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2039487. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2039487>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2021). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (5th ed.). Wiley
- Musteen, M., Datta, D. K., & Butts, M. M. (2021). Do international networks and knowledge facilitate SME internationalization? *Journal of World Business*, 56(2), 101195. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101195>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2021). Thematic analysis revisited: Trustworthiness and rigor in qualitative analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 1–10. <https://doi.org/10.1177/16094069211002059>
- OECD. (2021). *SME and entrepreneurship outlook 2021*.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2020). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 47(4), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-020-01024-2>
- Paul, J., & Rosado-Serrano, A. (2019). Gradual internationalization vs born-global/international new venture models. *International Marketing Review*, 36(6), 830–858. <https://doi.org/10.1108/IMR-10-2018-0280>
- Prasetyo, E., & Nugroho, A. (2024). Legal awareness and export sustainability among Indonesian SMEs. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 31(1), 54–71. <https://doi.org/10.1108/JABES-11-2023-0345>
- Rahman, F., & Setiawan, D. (2022). Export legal compliance and transaction cost efficiency in Indonesian SMEs. *International Journal of Law and Management*, 64(5), 401–418. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2022-0097>
- Revindo, M. D., & Gan, C. (2016). Export stimuli, export stages and internationalization pathways: The case of Indonesian SMEs. *Economics and Sociology*, 9(4), 191–205. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-4/12>
- Revindo, M. D., Gan, C., & Massie, N. W. G. (2019). Factors affecting participation in export promotion programs and SMEs export performance. *Journal of International*

- Food & Agribusiness Marketing*, 31(2), 123–145.
<https://doi.org/10.1080/08974438.2018.1482484>
- Sari, D., & Widodo, E. (2022). Customs documentation challenges among Indonesian SMEs. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(3), 221–238.
<https://doi.org/10.14710/jab.v18i3.41329>
- Scott, W. R. (2020). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (5th ed.). SAGE Publications
- Suyanto, Salim, R., & Bloch, H. (2021). Determinants of export participation among Indonesian SMEs. *Economic Analysis and Policy*, 69, 1–14.
<https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.11.008>
- Tambunan, T. (2021). Export constraints and institutional challenges of Indonesian SMEs. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 36(2), 137–156.
<https://doi.org/10.22146/jieb.62187>
- Wahyuni, S., Fitriani, N., & Abdullah, M. (2023). Regional disparities in export readiness among Indonesian SMEs. *Heliyon*, 9(8), e18572.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18572>
- Yin, R. K. (2021). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.).